

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

Dion Setiawan
NPP.30.0234

*Asdaf Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email : dionsetiawan807@gmail.com*

Pembimbing Skripsi : Cut Laila Karmila, S.Sos M.A

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Poverty is a problem that almost everyone experiences. One of the policies to reduce poverty in Indonesia is the Family Hope Program. Purpose:* This study aims to determine the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Kunto Darussalam Sub-district, Kota Lama Village and to analyze the inhibiting factors of its implementation and the efforts made to overcome these inhibiting factors. **Metode:** *This research uses qualitative methods and data collection techniques using in-depth interviews, observation and documentation. Result/Findings:* The implementation of the government program in tackling poverty through the Family Hope Program (PKH) in Rokan Hulu Regency, Kunto Darussalam District, Kota Lama Village is not yet effective because there is still a lack of human resources, especially in the data collection process and supervision of the PKH fund distribution process and the budget in the Family Hope Program there are still people who fit the target criteria for PKH recipients but have not received it because of the limited budget from the government The Rokan Hulu Regency Social Service is expected to be able to provide more understanding to village officials about the importance of distributing and managing PKH data.

Keywords: *Implementation, Poverty, Family Hope Program (PKH)*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir semua mengalaminya. Salah satu kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan. Penelitian ini **Tujuan:** mengetahui pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kunto Darussalam Kelurahan Kota Lama dan untuk menganalisis faktor penghambat pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Penelitian ini menggunakan **Metode:** kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. **Hasil Temuan:** Implementasi Program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Kunto Darussalam Kelurahan Kota Lama belumlah efektif karena masih kurangnya sumberdaya manusia, khususnya dalam proses pendataan dan pengawasan proses penyaluran dana PKH serta anggaran dalam Program Keluarga Harapan masih ada masyarakat yang sesuai kriteria sasaran penerima PKH tetapi belum menerima karena terbatasnya anggaran dari pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih kepada aparat desa mengenai pentingnya penyaluran dan mengelola Data PKH.

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan uud 1945 mengamanatkan penyelenggara negara memiliki tugas untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pada Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemiskinan ialah keadaan seseorang yang tidak bisa melengkapi keperluan yang dasar misalnya pakaian, makanan, obat-obatan serta tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Dalam mengukur keadaan sosial serta ekonomi untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan dari pembangunan oleh pemerintah pada sebuah daerah ialah terdapatnya kemiskinan itu sendiri (Oktaviana et al., 2021). Pembangunan yang kurang merata di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari kondisi Desa-Desa tertinggal yang jauh dari perkotaan dengan ketidaknyamanan anggota masyarakat di Desa yang menghambat aktivitas masyarakat dikarenakan belum masuk aliran listrik, jalanan Desa dan jalan penghubung dengan kabupaten yang buruk yang tentunya sangat menghambat aktivitas masyarakat di daerah. Selain itu, adanya pembangunan dengan tidak menyeluruh tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya pemanfaat secara maksimal terhadap sumber daya yang berasal dari daerah yang mempunyai potensi dalam ekonomi yang bagus dalam waktu ke depannya. Sebuah pembangunan diharapkan dapat merata di semua wilayah kabupaten Rokan Hulu sesuai pada keperluan daerah masing-masing dalam meningkatkan pertumbuhan dari ekonomi serta mempercepat kesejahteraan untuk masyarakat. pelaksanaan program Keluarga Harapan di Kelurahan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan pertimbangan bahwa terdapat banyak kesimpangsiuran bantuan PKH ini sering terjadi. Sebagai contoh anggota masyarakat yang berhak menerima ternyata tidak menerima, sementara anggota masyarakat lainnya yang tidak berhak ternyata menerima Bantuan Tunai dari Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini terjadi karena terkadang nomor induk keluarga penerima itu ganda, proses pendataan calon penerima manfaat belum online, nama anggota masyarakat yang menerima sama akan tetapi nama yang tertera di kartu PKH ternyata berbeda, dan jumlah nominal uang yang diberikan dengan jumlah anak yang dikartu keluarga itu berbeda.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program Keluarga Harapan (PKH) tersebar di beberapa provinsi di Indonesia diantaranya Provinsi Riau. Penerima Manfaat Program ini di Provinsi Riau berjumlah Jumlah 163.693 Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota dengan petugas pendamping di seluruh Provinsi Riau sebanyak 714 orang. Pada skripsi ini peneliti mengangkat pelaksanaan program Keluarga Harapan di Kelurahan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan pertimbangan bahwa terdapat banyak kesimpangsiuran bantuan PKH ini sering terjadi. Sebagai contoh anggota masyarakat yang berhak menerima ternyata tidak menerima, sementara anggota masyarakat lainnya yang tidak berhak ternyata menerima Bantuan Tunai dari Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini terjadi karena terkadang nomor induk keluarga penerima itu ganda, proses pendataan calon penerima manfaat belum online, nama anggota masyarakat yang menerima sama akan tetapi nama yang tertera di kartu PKH ternyata berbeda, dan jumlah nominal uang yang diberikan dengan jumlah anak yang dikartu keluarga itu berbeda. Walaupun permasalahan muncul pada proses pelaksanaan program Keluarga Harapan, kebijakan penanggulangan kemiskinan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota masyarakat yang tergolong miskin di Kelurahan Kota lama Kecamatan Kunto Darussalam.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Proses penyusunan Peraturan daerah maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto, Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena melahirkan, serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan, penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Winarno (2002).

Sudirman Hala, Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, 2021, Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil sosialisasi program keluarga harapan di Desa Penyaguan telah dilaksanakan dengan baik, kebijakan dan penyusunan anggota disetiap kabupaten, kecamatan dan desa sesuai dengan tugas dan kewenangan sesuai SOP yang digunakan pada pedoman umum PKH, penelitian deskriptif, George C. Edward III.

Syahrial, Thazilla Desrina, Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman), hasil penelitian, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Pariaman standar mekanisme PKH sudah berjalan dengan baik, tetapi belum tepat sasaran. Apabila dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk membantu biaya kesehatan,

pendidikan dan social serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan Kesehatan, pendekatan analisis Kualitatif, Teori Menurut Sugiyono (2015:15),

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni ialah , sebuah penelitian terdahulu lokus penelitian bertempat dikecamatan pariaman timur kota pariaman, sedangkan lokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di kecamatan kunto darussalam.kemudian, penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan Teori Menurut Sugiyono (2015:15) sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi Edwards III.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan, pendukung dan hambatan, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten rokan hulu dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah kecamatan rokan hulu khususnya kecamatan kunto darussalam.

II. METODE

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara pendekatan kualitatif, dengan ini data yang nanti dikumpulkan berupa naskah hasil dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan catatan lapangan lainnya. Penelitian ini menggunakan 8 orang informan dalam menunjang penelitian untuk mendapatkan informasi. Dalam suatu penelitian informan secara sengaja ditemukan oleh penulis sesuai dengan pertimbangan tertentu terlebih dikarenakan para informan merupakan orang yang paham masalah dan juga mereka yang lebih mengetahui masalah yang sering terjadi pada Kecamatan kunto darussalam. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi instrumen penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri karena peneliti merupakan instrumen kunci yang menetapkan fokus penelitian, menetapkan informan sebagai sumber data, melakukan analisis data, reduksi data, menilai kualitas data serta mengumpulkan data dan membuat penarikan kesimpulan yang peneliti temukan di lapangan. Untuk mencari data dan informasi dari informan maka menggunakan pedoman observasi, dokumentasi dan wawancara sebagai instrumen pendukung penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur karena digunakan pedoman untuk menggali informasi sedalam-dalamnya sesuai kenyataan yang ada di lapangan, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini sangat berperan penting karena peneliti harus datang secara langsung dan melihat bagaimana kondisi yang ada di lapangan tempat penelitian. Pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan secara sistematis dengan standar yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Sugiyono (2020) mengatakan bahwa “Teknik pengumpulan data adalah teknik yang paling utama dalam penelitian, karena memiliki tujuan dari penelitian yaitu memperoleh data. Menurut Sugiyono (2020) analisis data memiliki sifat induktif, dimana dengan kata lain dalam menganalisis berdasarkan data, serta dalam pengembangan hipotesis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

implementasi program keluarga harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kunto Darussalam, Program keluarga harapan adalah salah satu program Kementerian Sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang semakin meningkat saat ini. Tetapi dalam penerapannya masih banyak kendala atau permasalahan yang dihadapi pemerintah kepada masyarakat dikarenakan susahnya daerah itu dijangkau hal tersebut yang membuat akses jalan yang kurang memadai serta jauhnya jarak yang ditempuh untuk mencapai desa tersebut hal ini yang terjadi di Kecamatan Kunto Darussalam Kelurahan Kota Lama. Tetapi pemerintah tetap berusaha agar daerah tersebut tetap mendapatkan bantuan program keluarga harapan.

3.1 komunikasi

Komunikasi ialah sebuah proses dalam penyampaian informasi dari komunikator terhadap komitmen. Sebuah informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik harus dilakukan penyampaian kepada pelaku dari kebijakan sehingga nantinya semua pelaku kebijakan bisa memahami apa yang perlu mereka siapkan serta laksanakan dalam melakukan kebijakan tersebut yang nantinya sasaran serta tujuan dari kebijakan bisa digapai tepat pada apa yang diharapkan komunikasi bisa memudahkan didalam proses penyaluran serta penyampaian informasi dari Dinas Sosial sebagai utusan dari pemerintah kepada semua penerima bantuan dari PKH ataupun KPM PKH, mengerti secara jelas dengan apa yang dimaksud, tujuan dan bagaimana cara dalam pengambilan bantuan dari PKH. Sebuah dimensi didalam variabel komunikasi tersebut ialah aktivitas transmisi, konsistensi, serta kejelasan. Bila dikaitkan dengan variabel komunikasi dari Teori Edward III maka dapat ditegaskan bahwa aparatur pada Dinas Sosial telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mewujudkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat tentang upaya menverifikasi data keluarga yang berhak mendapatkan bantuan dari Program PKH. Dengan dukungan dari para koordinator baik di tingkat Provinsi, Kabupaten hingga Desa komunikasi dapat terwujud dalam upaya membantu keluarga yang tergolong berpenghasilan rendah atau memiliki banyak tanggungan dengan penghasilan yang tidak memadai. Upaya koordinator lebih pada mengkomunikasikan usulan data keluarga yang membutuhkan bantuan Program PKH dan melakukan pengawasan secara berkala kepada penerima bantuan PKH di wilayahnya.

3.2 Sumber Daya

Adapun aspek selanjutnya dalam mengimplementasikan sebuah program ialah sumber daya tersebut yang mencakup; sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan serta sumber daya kewenangan.

Sumber daya manusia ialah pribadi dengan pekerjaan sebagai penggerak sebuah organisasi, yakni institusi ataupun perusahaan serta memiliki fungsi menjadi aset yang perlu diberikan pelatihan serta perkembangan kemampuan.

Kuantitas serta kualitas sumber daya manusia pada pelaksanaan terhadap program sangatlah mempengaruhi. Kualitas sumber daya manusia pada program implementasi program keluarga harapan dalam menanggulangi kemiskinan dengan melalui kemampuan, keterampilan serta pengetahuan dari seseorang yang bisa dipakai dalam menciptakan layanan secara profesional untuk masyarakat pada pelaksanaan program ini.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu sampai sekarang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 26 orang aparatur sipil negara.

Sumber daya anggaran adalah yang penting didalam penentuan keberhasilan implementasi kebijakan ialah kewenangan. Kewenangan ialah bentuk kekuasaan secara formal baik secara kekuasaan secara legislatif maupun kekuasaan secara eksekutif. Kewenangan program berhubungan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang diberikan kepada pelaksana dari program penanggulangan kemiskinan dengan bantuan PKH oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam penyaluran terhadap bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) yang diberikan untuk KPM dengan penetapan oleh Kementerian Sosial. Besaran nominal yang diterima oleh KPM terdapat perbedaan di setiap kategorinya. Adapun golongan yang berhak menerima bantuan sosial PKH disesuaikan dengan keadaan keluarga penerima manfaat (KPM) .

3.3 Disposisi

Disposisi ataupun sikap pelaksana kebijakan terbentuk menjadi komitmen serta sikap yang tegas. Apabila dihubungkan dengan implementasi program PKH untuk penanggulangan kemiskinan, komitmen berasal dari pelaksana mulai dari tingkat Kecamatan sampai Kementerian. Pada pelaksanaan PKH pengelola program membentuk tim pelaksana di tingkat pusat yang disebut tim pusat yang kemudian didukung oleh tim kabupaten merupakan akan direkomendasikan dari pihak dinas sosial kabupaten yang diusulkan ke pusat serta disusun Surat Keputusan Menteri sebagai tim pelaksana PKH. Personil pada tim pelaksana berkoordinasi dengan fasilitator yang ada di kecamatan yang sudah ditugaskan pada implementasi program tersebut dengan integritas, kompetensi serta loyalitas yang dipunyai untuk pelaksanaan dari kebijakan.

Dalam pelaksanaan program pelayanan ini tahun 2022 Kementerian Sosial melimpahkan kewenangan ke pemerintah kabupaten Rokan Hulu untuk mempersiapkan beberapa aspek untuk memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan sebagaimana dan tepat waktu. Aspek yang dipersiapkan yaitu pendampingan pelaksanaan dalam proses menuju tempat pelayanan. Kerena medan tempuh yang kurang baik sehingga sangat sulit dilalui.

3.4 Stuktur birokrasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan

Struktur Birokrasi ialah karakteristik, pola-pola serta norma-norma hubungan yang berlangsung secara berulang pada badan eksekutif yang memiliki ikatan baik potensial ataupun nyata pada apa

yang mereka punyai didalam melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam struktur organiasi yang memiliki tugas dalam melakukan implementasi kebijakan mempunyai pengaruh secara besar didalam melakukan implementasi terhadap kebijakan. Pada salah satu faktor struktur yang memiliki kepentingan pada setiap organisasinya ialah terdapat prosedur dalam operasi yang standar (*standard operating procedures*)

Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sebagai pendekatan dalam tahapan implementasi kebijakan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan Program keluarga Harapan (PKH), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ialah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah yang mempunyai alasan serta tujuan yang tertentu. Pada Program ini hadir dalam perwujudan terdapatnya tindakan dari pemerintahan dengan berisi nilai-nilai yang khusus, yang kemudian ditujukan untuk memecahkan permasalahan publik yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Permasalahan publik yang dimaksud ialah persoalan terhadap kemiskinan. Adapun struktur birokrasi dalam melaksanakan kebijakan ini meliputi; Standar Operasional Prosedur Kebijakan, Koordinasi terhadap Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Dinas terkait.

3.5. Diskusi Temuan Utama

Komunikasi merupakan sebuah proses dalam penyampaian informasi dari komunikator terhadap komitmen, dalam pelaksanaan program keluarga harapan komunikasi, konsistensi, transmisi yang dilakukan oleh dinas sosial maupun dari keluarahan sebagai pelaksana program memang sudah berjalan tetapi masih belum efektif disebabkan masih terdapat hambatan, Sumber daya terbagi atas 3, yaitu : Sumber daya manusia, Sumber daya finansial, anggaran, sumber daya wewenang, sumber daya fasilitas. Terlihat jelas dari pelaksanaan program keluarga harapan dikelurahan kota lama memiliki kekurangan dari sumber daya manusia disebabkan masih mengalami keterlambatan dalam penyaluran bantuan dan juga dari sumber daya anggaran masih terdapat penerima bantuan yang tidak mendapatkan yang seharusnya didapati, Dalam pelaksanaan program keluarga harapan yang menjadi pelaksana harus memiliki komitmen dan sikap yang tegas dalam pelaksanaan program dikelurahan kota lama masih terdapat terkadang dari pihak pelaksana terlambat datang kelokasi penyaluran bantuan PKH, Terkait dengan struktur birokrasi yang dilakukan oleh dinas sosial, dinas pemberdayaan, bapeda, lurah, dan desa terkadang ada beberapa masalah yang disebabkan oleh dalam pembagian tugas ada kekeliruan yang membuat keputusan itu tidak disetujui.

3.6 Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan dikelurahan kunto darussalam

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan dikelurahan kunto darussalam memiliki faktor penghambat antara lain:

Rendahnya keterbukaan dari adanya proses dalam pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Pada proses terhadap penyaluran dana bantuan untuk PKH sering terjadi keterlambatan
Rendahnya kemampuan KPM didalam menggunakan teknologi aplikasi dari e-PKH.

3.7 Upaya untuk mengatasi faktor penghambat implementasi Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan dikecamatan kunto darussalam

Untuk mengatasi faktor yang menghambat implementasi Program Keluarga Harapan di kabupaten rokan hulu , maka Pemerintah melakukan upaya guna mendukung implementasi PKH sebagai berikut:

Perkembangan atas keterbukaan dari adanya proses dalam pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga nantinya dapat sesuai pada sasaran terhadap penerima bantuan

Menginformasikan kepada KPM PKH apabila dana bantuan terlambat masuk kepada rekening KPM maka nantinya akan dilakukan bimbingan atau sosialisasi untuk KPM PKH sebagai pengetahuan didalam

meningkatkan keterampilan dan menggunakan teknologi.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalul Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten rokan hulu khususnya keluarahan kota lama, belum berjalan efektif dikarenakan rendahnya SDM, yakni secara terkhusus didalam proses pengawasan serta pendataan dari penyaluran dana untuk PKH dan anggaran pada program PKH ini terdapat masyarakat yang tepat dengan kriteria dari sasaran penerima PKH namun belum mendapatkannya sebab keterbatasan anggaran yang datang dari pemerintah. Adanya hambatan yang menjadikan belum efektifnya sebuah implementasi kebijakan pemerintah di dalam penanggulangan kemiskinan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu; terdapatnya data yang belum akurat serta rendahnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan dari dana tersebut. Upaya pemerintah Kabupaten rokan hulu dalam kebijakan ini, yakni; meningkatkan memperbaiki data dan mensikronisasi data pada beberapa intansi terkait tentang penerima bantuan tersebut. Dan meningkatkan kesadaran SDM terkait dan aparat pemerintah Desa dalam penyaluran dana dan pengelolaan data penerima Program Keluarga Harapa (PKH) dalam melalui sosialisasi. Apabila terjadi pelanggaran kepada aparat desa dan dinas terkait maka harus diberikan sanksi yang tegas sebagai efek jera berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implmentasi program keluarga harapan dalam menanggulangi kemiskinan dikecamatan kunto darussalam untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada bapak kepala dinas sosial kabupaten rokan hulu dan bapak lurah kelurahan kotalama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun. *Jurnal Syntax Idea*, 4(1), 6.

Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). (2016). Kementerian Sosial RI.

Solichin, Abdul Wahab. (2004). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara: Edisi Kedua. Bumi Aksara: Jakarta.

Sugiyono.(2020). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.Bandung:Alfabeta

Syahrial , Thazilla Desrina (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman). Universitas Sumatera Barat.

Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto. Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Universitas Brawijaya

Sudirman Hala. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Penyuguan Kecamatan Batang Gasal Kabupaten Indragiri Hulu.

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Peraturan Pemerintahan No 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PERPRES No. 15 Tahun 2010 Tentang Program Percepatan Penganggulan Kemiskinaan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan, Riau Terima 163.693 Keluarga Penerima Manfaat.24 Maret 2022.

<https://www.riaubisa.com/berita/9465/program-keluarga-harapan-riau-terima-163-693-keluarga-penerima-manfaat>